

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur



Oleh :

WIDYA PRITA YULIVIATI
NPM : 0771010067

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK
DESAIN INDUSTRI

Oleh :

WIDYA PRITA YULIVIATI
NPM. 0771010067

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 19 Mei 2013

Pembimbing Utama

Tim Penguji

SUTRISNO SH., M.Hum
NIP. 19 620625 198803 1001

1. YANA INDAWATI SH., M.Kn
NPT. 379010 70224

Pembimbing Pendamping

2. FAUZUL ALIWARMAN, SH., M.Hum
NPT. 38202070221

WIWIN YULIANINGSIH, SH, M. Kn
NPT. 37507070225

3. SUTRISNO SH., M. Hum
NIP. 19 620625 198803 1001

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH, MM
NIP. 19 620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK
DESAIN INDUSTRI

Disusun Oleh :

WIDYA PRITA YULIVIATI
NPM. 0771010067

Telah mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

Tim Penguji

1. YANA INDAWATI SH., M.Kn (.....)
NPT. 379010 70224

2. FAUZUL ALIWARMAN, SHI.,M.Hum (.....)
NPT. 38202070221

3. SUTRISNO SH., M.Hum (.....)
NIP. 19 620625 198803 1001

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK DESAIN
INDUSTRI

Disusun Oleh :

WIDYA PRITA YULIVIATI
NPM. 0771010067

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 1961212 198803 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn.
NIP/NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: Widya Prita Yuliviati

Tempat/ Tanggal Lahir: Surabaya/ 17 Desember 1989

NPM: 0771010067

Konsentrasi: Perdata

Alamat: Perum TNI-AL Blok BXIV / 5 Candi-Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN HAK DESAIN INDUSTRI dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia di tuntutan di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarajanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Surabaya, 19 Juni 2013

Pembimbing Utama

Penulis

SUTRISNO SH., M.Hum

NIP. 1961212 198803 1 001

WIDYA PRITA YULIVIATI

NPM 0771010067

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat dan karenanya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan laporan praktek magang ini. Dengan mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Yang dimaksud guna untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Disamping itu juga dapat diharapkan dengan melakukan praktek magang ini dapat memberikan bekal berkaitan dengan ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistyantoro,SH.,MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa dan Bapak H.Sutrisno,SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. H. Sutrisno, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur dan selaku sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada

penulis dalam pembuatan laporan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno,MS. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Subani S.H, M.si, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”VETERAN” Jawa Timur.
5. Bapak TRI Priyono SH, selaku Kepala Sie Pendaftaran dan Penyidikan Bidang Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM RI Jawa Timur beserta seluruh anggota yang telah member kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan penelitian dan dapat segala bentuk bantuan berupa data yang saya butuhkan.
6. Ibu Dwi, SH, Selaku Administrasi Pengadilan Niaga Surabaya yang telah membantu memberi data yang saya butuhkan.
7. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH., M.kn. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
8. Bapak Sariyanto dan Ibu Warsih selaku bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran”Jawa Timur
9. Papa saya tercinta,serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta do’a selama ini.
10. Almh mama saya tercinta, serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta do’a selama ini.

11. Tantesaya Tutik Wahyuniarti SH yang membantu dalam pencarian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi seta kasih sayang yang sepenuhnya.
12. Tante saya Ernawati Dwiastuti, SE, yang telah memberi dorongan dan kasih sayang selama ini.
13. Kakak saya tercinta Ririn Rianawati S.kom yang ada di Jakarta yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta do'a selama ini.
14. Adik saya yang Asep Adi D.P yang memberi dukungan sepenuhnya.
15. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah membantu dan memberikan saran dan masukan didalam pembuatan skripsi.
16. Terima kasih buat teman saya Imelda Saragi atas masukannya dalam pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 23 November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktisi.....	6
1.5 Kajian Pustaka	
1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Desain Industri.....	6
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	6
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	8
1.5.2.1 Jenis-jenis Perusahaan	8
1.5.2.2 Jenis-jenis Organisasi Perusahaan	9

1.5.3 Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
1.5.3.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	9
1.5.3.2 Pengertian TRIPS	15
1.5.3.3 Desain Industri Yang Mendapat Perlindungan.....	16
1.5.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri	16
1.5.3.5 Pengertian Desain Industri	15
1.5.3.6 Hak Eksklusif Desain Industri	17
1.5.3.7 Pembatalan Pendaftaran Desain Industri.....	18
1.5.3.8 Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan.....	19
1.5.3.9 Perkembangan Desain Dalam Industri Di Dunia	20
1.5.3.10 Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia	21
1.5.3.11 Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	24
1.5.3.12 Pengertian Wanprestasi.....	24
1.5.3.13 Pengertian Pemegang Hak Khususnya Desain Industri .	25
1.5.4 Pengertian Perjanjian.....	26
1.5.4.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
1.5.4.2 Kecakapan Dalam Membuat Perjanjian.....	27
1.5.4.3 Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	27
1.5.4.4 Perjanjian Yang Daluarsa	28
1.5.4.5 Lisensi Industri	29
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian	31

1.6.2 Sumber Data.....	31
1.6.3 Metode Pengolahan Data Dan Pengumpulan Data	32
1.6.4 Metode Analisa Data	33
1.6.5 Lokasi Penelitian	33
1.6.7 Waktu Penelitian	33
1.6.8 Sistematika Penulisan	34
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT.X AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI OLEH MANTAN KOMISARIS PERUSAHAAN	
2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan	39
2.2. Bentuk Upaya Dari PT.X untuk Pembatalan Sertifikat Desain Industri	47
 BAB III DAMPAK DARI PENERBITAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI YANG DIMILIKI OLEH MANTAN KOMISARIS TERHADAP PERUSAHAAN TERSEBUT	
3.1 Dampak Positif Penerbitan Sertifikat Desain Industri	54
3.2 Dampak Negatif Penerbitan Sertifikat Desain Industri.....	54
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWATIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Widya Prita Yuliviati

NPM : 0771010067

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 17 Desember 1989

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK
DESAIN INDUSTRI

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perusahaan pemegang hak desain industri yang bersertifikat atas nama mantan komisaris perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis. Sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur-literatur, karya tulis ilmiah, perundang-undangan yang berlaku, dan putusan-putusan dari pengadilan negeri. Analisa ini menggunakan kualitatif serta menggunakan putusan dari pengadilan niaga sebagai acuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak desain industri atas nama mantan komisaris adalah sertifikat desain desain industri milik perusahaan bukan milik mantan komisaris secara individu. Hak desain industri milik perusahaan dimulai sejak berdirinya perusahaan. Pada tahun 2000 lahirnya undang-undang desain industri perusahaan mendaftarkan barang produksi milik perusahaan atas nama mantan komisaris dan disertai dengan perjanjian antara mantan komisaris dengan perusahaan selama mantan komisaris masih mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Hal ini yang menyebabkan perusahaan merasa dirugikan oleh mantan komisaris karena sertifikat tersebut diakui secara individu oleh mantan komisaris.

Kata Kunci: perlindungan hukum, desain industri, perbuatan melawan hukum

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban, dengan demikian hukum itu berlaku untuk masyarakat Indonesia sebagai pedoman berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia.

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus memberikan keadilan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan lain sebagainya bagi masyarakat.

Untuk hal-hal tersebut, maka dibutuhkan suatu pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan tersebut harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Pembangunan ini dilakukan di segala bidang yang berkaitan dengan bidang hukum, karena hukum mempunyai peranan dalam pembangunan yaitu untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Dengan demikian setiap pembangunan diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat mengawasi terjadinya pembangunan tersebut agar dapat berjalan dengan teratur sesuai dengan tujuan pembangunan.¹

¹ Universitas Trisula, Pengertian HKI Menurut Hukum Di Indonesia, Respository.fhunla.ac.id, Minggu, 07, 04, 13, 20.15 wib

Pembangunan nasional diantaranya adalah pembangunan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan perangkat hukumnya untuk segala bidang perekonomian guna mengatur pembangunan nasional. Perindustrian sebagai salah satu bidang dalam perekonomian juga membutuhkan perangkat hukum. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga banyak pula pelanggaran yang terjadi didalamnya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam perindustrian.

Dalam bidang perindustrian ini, kekayaan intelektual digunakan untuk merancang atau mendesain suatu barang yang akan diproduksi dan dipasarkan sebagai suatu produk atau barang jadi. Rancangan atau desain inilah yang disebut dengan desain industri. Desain Industri adalah bidang yang sangat banyak berkaitan dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian. Pelanggaran seperti ini dalam hukum perdata termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), karena dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain, yaitu pemilik Desain Industri sebelumnya.

Desain produk industri dilindungi hukum karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran dan imajinasi seseorang, sehingga sering disebut sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda tidak berwujud. Di

Indonesia Hak Kekayaan Intelektual di kelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002.
2. Hak Paten diatur dalam Undang-undang No 14 Tahun 2001.
3. Hak Merek dan indikasi geografis diatur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001.
4. Varietas Tanaman diatur dalam Undang-undang No 29 Tahun 2000.
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 2000.
6. Desain Industri diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 2000.
7. Desain Tata Letak Sirkuit diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2000²

Negara Indonesia adalah salah satu anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) yang sebelumnya bernama General Agreement on Tariffs and Trade (selanjutnya disebut GATT), yang tercantum dalam perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIP's) maka pemerintah Negara Indonesia harus meratifikasi aturan-aturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah mengenai desain produk industri yang belum ada pengaturan tersendiri. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri).

Pelaksanaan Undang-undang tersebut membutuhkan suatu peraturan yang khusus, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

² Ibid

(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Desain Industri). Undang-Undang Desain Industri mengatur mengenai perlindungan terhadap rancangan atau desain penampilan luar dari suatu produk pendaftaran pengalihan hak dan lisensi, pembatalan pendaftaran Desain Industri, dan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Pelaksanaan pendaftaran Hak Desain Industri dilakukan oleh Pemerintah yang menunjuk Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI) untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini bidang Desain Industri. Desain Industri mendapat perlindungan hukum, yang tercantum dalam Desain Industri yang mendapat perlindungan Undang-Undang Desain Industri, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru”. Pasal tersebut dinyatakan untuk memotivasi para pendesain untuk dapat berkreasi sebebasnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Hal ini juga dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak desain industri. Pada kenyataannya banyak terjadi sengketa desain industri yang mengakibatkan pembatalan pendaftaran desain industri dikarenakan desain yang didaftarkan mempunyai kemiripan dengan desain industri yang sebelumnya sudah terdaftar. Dikarenakan prosedur pendaftaran yang kurang maksimal, seharusnya desain yang sudah terdaftar dan yang akan mendaftar diumumkan di segala media agar masyarakat luas dapat mengetahui desain-desain

yang sudah terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga pembatalan pendaftaran desain tersebut akan berkurang.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri, dan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga. Sebagai salah satu contoh sengketa desain industri adalah sengketa yang terjadi antara PT. X. sebagai penggugat dengan komisaris perusahaan tersebut sebagai tergugat. Kedua belah pihak tersebut memiliki desain produk yang sama namun karena PT.X merasa bahwa pihaknya merupakan pemilik pertama dari desain produk tersebut dari produksi dan dipasarkan, maka pihaknya mengajukan pembatalan pendaftaran Desain Industri milik mantan komisaris PT.X ke Pengadilan Niaga Surabaya. Karena permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian yang dilakukan kedalam bentuk skripsi dengan menggunakan produk dan hasil karya perusahaan agar perusahaan tidak merasa dirugikan .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT. X akibat penerbitan sertifikat Desain Industri yang dimiliki oleh mantan komisaris perusahaan tersebut?
2. Apa dampak dari penerbitan sertifikat Desain Industri yang dimiliki oleh mantan komisaris PT. X terhadap perusahaan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan yang hak desainnya dilanggar oleh komisaris.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan jika komisaris perusahaan tidak memiliki etika baik haknya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan ilmu Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftarkan hasil karya kesenian dalam perlindungan desain hukum bagi pemilik desain industri dan masyarakat juga mengetahui desain yang resmi dan mana desain yang tidak resmi serta desain yang cacat hukum. Dan juga perlindungan hukum bagi perusahaan yang mendapat hak Desain Industri.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti ini bermaksud untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, agar hasil karya kesenian bisa diberikan perlindungan hukum kepada pendesain pemilik, dan perusahaan agar tidak terjadi pembajakan karya seni tanpa seijin pendesain dan pemilik desain industri tanpa seijin perusahaan yang resmi. Jika memproduksi hasil karya perusahaan yang sudah beredar di masyarakat luas agar perusahaan tidak merasa dirugikan oleh pihak mana pun.

1.5. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Tidak semua desain industri yang dapat dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh negara dapat diberikan oleh pendesain. Batasan tentang desain

industri yang baru itu oleh Undang-undang tentang desain industri disebutkan bahwa: “Desain industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru”.

Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:

1. Tanggal penerimaan; atau
2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut;³

Secara umum dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, perbuatan yang melindungi.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No 23 Tahun 2004. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang diajukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial,

³OK.saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Medan, PT Raja Grafindo, 2004, h. 473

kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara). Pada dasarnya merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan kebijaksanaan publik dapat terwujud didalam masyarakat.⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Perusahaan

Secara umum perusahaan (business) adalah suatu organisasi dimana sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa (output) bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah laba/keuntungan. Laba (profit) adalah selisi antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa, yang dikeluarkan untuk sumber daya alam dalam menghasilkan barang atau jasa.

1.5.2.1 Jenis –jenis perusahaan

Terdapat 3 (tiga) jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba yaitu:

a. Perusahaan Manufaktur (Manufacturing)

Mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada masing-masing pelanggan.

b. Perusahaan Dagang (Merchandising)

Menjual produk kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk barang dan jasa.

⁴ Jerry Sucahyo, Perlindungan Hukum, www.scribd.com, Senin, 08, 04, 2013, 22.00 wib

c. Perusahaan Jasa (Service)

Menghasilkan jasa untuk pelanggan.⁵

1.5.2.2 Jenis –jenis Organisasi Perusahaan

Umumnya terdapat 4 (empat) bentuk perusahaan yang berbeda yakni:

1. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan.
2. Persekutuan (partnersip) dimiliki oleh dua orang atau individu lebih.
3. Korporasi (corporation) dibentuk sebagai suatu badan hukum terpisah.
4. Perusahaan dengan kewajiban terbatas (limited liability corporation).

Menggabungkan karakteristik persekutuan dan korporasi. Ke tiga jenis perusahaan (manufaktur, dagang, dan jasa) dapat berbentuk perseorangan, persekutuan, korporasi maupun campuran.⁶

1.5.3.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights. Berdasarkan substansinya, Hak Kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari

⁵ Ibid

⁶ Ilham Ramdani, Jenis Organisasi Perusahaan, www.wordpress.com, Senin, 08, 04, 2013, 22.35 wib

sebuah definisi yang tepat untuk Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komprehensif dan mencakup sebuah aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.⁷

1.5.3.2 Pengertian Trade Related of Intellectual Property Rights atau TRIPS

Secara kasat mata TRIPS agreement merupakan “unsur asing” dalam ketentuan WTO, dimana ketentuan WTO lainnya berkaitan dengan perdagangan dan peraturan perdagangan. TRIPS Agreement berfokus pada pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau kurangnya perlindungan atas hak tersebut, dilihat oleh banyak orang terutama dari negara maju, merupakan sebuah hambatan terhadap perdagangan. Nilai ekonomi dari banyak produk, dalam batasan tertentu banyak ditentukan oleh ide dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah produk atau reputasi dan kesadaran masyarakat atas produk dan produsen tersebut. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek adalah sangat penting bagi produsen dari negara berkembang.

Tanpa adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang cukup, perdagangan Internasional tidak akan berkembang. Maka dari itu TRIPS Agreement memberikan aturan mengenai

⁷ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Di Era Globalisasi, Yogyakarta, Graha Ilmu 2005, h.1

standar perlindungan terhadap tujuh kategori Hak Kekayaan Intelektual, dimana yang paling penting adalah:

1. Hak cipta (seperti hak dan Brown atas karya ciptanya buku D Vinci Code).
2. Merek (seperti Coca Cocala dan Blackberry).
3. Indikasi geografis (seperti di Indonesia beras Cianjur dan ubi Cilembu).
4. Paten (seperti yang ada diobat baru).

Setiap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai isi dan karakteristik yang berbeda tergantung dari apa yang ingin dilindungi. Perlindungan minimum yang diatur oleh TRIPS Agreement berbeda antara satu Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lain. Sebagai contoh perlindungan minimum yang ditentukan oleh TRIPS Agreement adalah anggota WTO harus melindungi hak cipta si pengarang masih hidup ditambah dengan paling sedikit lima puluh tahun setelah meninggalnya si pengarang.⁸

Keberadaan perjanjian TRIPS di bawah administrasi organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization atau WTO) membawa pendekatan baru terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tingkat Internasional. Negara-negara berkembang tidak setuju dengan keberadaan perjanjian TRIPS

⁸ Peter Van Den Bossche, Pengantar Hukum WTO, Jakarkata, Yayasan Obor Indonesia, 2010, h. 187

dengan alasan bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk melestarikan monopoli negara-negara maju atas negara-negara berkembang di bidang ekonomi dan teknologi.

Perjanjian tersebut juga diyakini oleh negara berkembang sebagai faktor yang akan memperbesar jurang pemisah antara kedua kelompok negara tersebut, terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, India dan Brazil sempat mengkritik masuknya Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu agenda di dalam forum GATT atas dasar bahwa telah ada WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah organisasi Internasional yang bernaung dibawah administrasi PBB dan menangani secara khusus permasalahan disekitar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat Internasional.

Pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat Eropa berhasil meyakinkan negara-negara bahwa WIPO (World Intellectual Property Organization) telah gagal dalam menyediakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional. Oleh karena itu dibutuhkan organisasi yang baru untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara efektif.

GATT adalah sebuah pilihan yang tepat untuk melengkapi keberadaan WIPO (World Intellectual Property Organization) karena telah memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang

diyakini oleh negara-negara maju sebagai sebuah pranata yang lebih menjanjikan untuk menyelesaikan perselisihan Hak Kekayaan Intelektual. Meskipun perjanjian tersebut dianggap sebagai sebuah perjanjian yang kontroversial, mayoritas negara-negara berkembang akhirnya bersedia menandatangani perjanjian tersebut dan tunduk dengan standard internasional yang telah ditetapkannya. Setidaknya ada dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena ini.

Pertama sejak negara-negara berkembang menggantungkan ekonominya terhadap pinjaman lunak dari sponsor luar negeri dan penanaman modal asing, kebanyakan negara berkembang terpaksa memutuskan untuk tunduk dengan perjanjian TRIPS dengan alasan keikutsertaan mereka dapat membantu perkembangan ekonomi negara mereka. Alasan ini masuk akal karena penundukan diri terhadap perjanjian tersebut akan menjadi salah satu syarat penting untuk menarik investor asing.

Kedua, perjanjian TRIPS adalah satu dari persyaratan penting untuk menjadi anggota organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization). Menjadi sebuah organisasi penting dalam perdagangan internasional, kebanyakan negara

berkembang memilih untuk menundukan diri terhadap perjanjian TRIPS.⁹

1.5.3.3 Pengertian Pasal 1 Undang-undang No 31 Tentang Desain Industri Tahun 2000

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesaian adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.
5. Hak desain industri adalah eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tertentu.
6. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk desain industri.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah tangan departemen yang dipimpin oleh Menteri.
8. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrative.
10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

⁹ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Di Era goba, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, h. 33

11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan kepada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
12. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
13. Hari adalah hari kerja.¹⁰

1.5.3.4 Desain Industri Yang Mendapat Perlindungan

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.¹¹

¹⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual MENKUMHAM Kompilasi Peraturan Perundang-undangan, Tangerang , Sinar Grafika, 2010 h.383

¹¹ Hak Kekayaan Intelektual, Bab II lingkup Desain Industri pasal 2 dan Bab 3, Graha Ilmu, Jakarta 2010

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri (Pasal 4) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan

1.5.3.5 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

1. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung tanggal penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

1.5.3.6 Pengertian Desain Industri

Desain industri adalah suatu kresasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna gabungan dari pada yang berbentuk tiga dimensi atau dan dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam tiga pola dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian ini memuat unsur-unsur:

1. Adanya suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
2. Memberikan kesan estetis.
3. Dapat diwujudkan dalam tiga pola dimensi atau dua dimensi.

4. Pola tersebut dapat diwujudkan menjadi produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa penekanan desain industri terletak pada pola, kesan estetis dan dapat diproduksi, Desain Industri.¹²

1.5.3.7 Hak Eksklusif Desain Industri

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.¹³

Syarat-syarat substantif desain industri

- a. Bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna baru (new).
- b. Memiliki nilai estetika.
- c. Dapat dimanufaktur.

Contoh desain industri

1. Perabotan dapur (kitchen ware).
2. Perlengkapan kamar mandi (bathroom accessories).
3. Mebel (furniture).
4. Mainan (toys).
5. Suku cadang (sparepart).
6. Perlengkapan computer (computer keyboard).
7. Telepon (telephone).

¹² Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum, Hak Desain Industri, Srikandi, Surabaya, 2006 h.40

¹³ Rahmi Jened, Intellectual Property Rights, Law Faculty of Airlangga University, h.70

8. Lampu-lampu (light fitting).

- a. Pendaftaran pertama (first to file) melalui aplikasi pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Jangka waktu perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan berita resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pemegang hak milik eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu¹⁴.

1. Pengakuan hak perlindungan hukum
2. Monopoli terbatas (limited monopoly) dan monopoli yang sah secara hukum (legalized monopoly) sebagai barrier to entry bagi competitor.
3. Potensi untuk mengeksploitasi secara komersial dengan memperoleh manfaat ekonomi.¹⁵

1.5.3.8 Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Desai Industri Tahun 2000 berdasarkan permintaan pemegang hak Desain Industri

1. Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.

¹⁴ Ibid, h. 79

¹⁵ Ibid, h. 91

2. Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam daftar umum Desain Industri memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
3. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a. Pemegang Hak Desain Industri;
 - b. Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri.
 - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatal.
4. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.¹⁶

1.5.3.9 Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

¹⁶ Direktorat Jenderal Hak Keayaan Intelektual MENKUMHAN Kompilasi Perundang-undangan, Sinar Grafika, Tangerang 2010 h.396

2. Putusan Pengadilan Niaga Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan.¹⁷

1.5.3.10 Perkembangan desain dalam industri di dunia

Gambaran sejarah desain produk industri dapat disimpulkan bahwa perkembangan desain produk industri terbagi atas tiga fase yaitu:

1. Fase pertama abad ke 18 di Eropa desain produk industri lebih dititik beratkan pada nilai seni dan nilai estesisnya serta metode yang dipeergunakan adalah kerajinan, sistem pabrikan telah di kenal namun masih menggunakan metode tradisional.
2. Fase kedua abad 19 desain produk industrinlebih menitik beratkan pada kemanfaatan dan fungsinya terutama untuk desain pernakat keras (kereta api dan mesin uap), akan tetapi untuk industri perangkat lunak (alat rumah tangga) tetap menitik beratkan pada nilai seninya dari pada fungsinya, hanya untuk di Amerika lebih menekankan kepada jumlah dan kemanfaatan dan dikenal dengan produk massal.
3. Fase ketiga terbagi atas tiga periode yaitu periode pertama adanya ketertarikan antara desain, teknologi dan ekonomi,

¹⁷ Ibid, h.397

kedua, adanya pengaruh politik terhadap perkembangan desain ekonomi, desain dan perubahan sosial.

1.5.3.11 Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian

pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual

merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi Hak Kekayaan Intelektual juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.

Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (dimana termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi Undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain.¹⁸

¹⁸ Dirjen HKI, Pengakuan HKI Di Indonesia, <http://hki.bppt.go.id>, Rabu, 11, 04, 12, 10.10 wib

1.5.3.12 Upaya Hukum Dalam Undang-undang Hak Kekayaan

Intelektual No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pasal 46

1. Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi.
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.¹⁹

Pasal 48

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

1.5.3.13 Pengertian Wanprestasi

Dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ini menetapkan si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan.

¹⁹ F. Agsyu Guza, Hak Kekayaan Intelektual, Asa Mandiri, Jakarta, 2011, h. 215

Wanprestasi adalah suatu perbuatan kelalaian atau kealpaan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, dimana:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan.
- c. Melakukannya apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukannya sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

1.5.3.14 Pengertian Pemegang Hak Khususnya Hak Desain Industri

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Desain Industri antara lain:

Pendesain: seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

²⁰ KUHPperdata, h. 285

Hak Desain Industri: Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²¹

1.5.4 Pengertian Perjanjian

Perjanjian sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Unsur-unsur meliputi:

1. Perbuatan dalam perjanjian disebut perbuatan hukum dimana suatu perbuatan akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
2. Satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih, dalam suatu perjanjian paling tidak ada dua pihak yang saling berhadapan dan menyatakan kesepakatan. Para pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3. Mengikatkan dirinya, dalam suatu perjanjian para pihak harus mengikatkan diri atas akibat hukum yang muncul dari kehendak masing-masing pihak.²²

1.5.4.1 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat diman tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.²³

²¹ Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual, Bab I Ketentuan Umum, h. 384

²² Sri Utami, Pengertian Hukum Perjanjian, www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian, Sabtu, 22, 09, 12, jam 20.00 wib

²³ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, h. 17

1.5.4.2 Kecakapan Dalam Membuat Perjanjian

Orang-orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aklil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap dalam suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada didalam pengampuan.
3. Orang perempuan yang dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁴

1.5.4.3 Asas-asas Dalam hukum Perjanjian

Berdasarkan teori, didalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah beralku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
 - c. Menentukan perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
 - d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
2. Asas Konsesulisme
Asas konsulisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah

²⁴ Ibid Subekti, h.17

pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas Kepastian Hukum (pacta sun servanda)

Merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

4. Asas Itikad baik (Good Faith)

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH menegaskan: “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.”²⁵

1.5.4.4 Perjanjian Yang Daluwarsa

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang tercantum dalam Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa dibedakan dengan:

1. Pelepasan hak: hilangnya hak, bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak.
2. Decheance: Undang-undang ada kalanya memberikan hak hanya untuk suatu waktu tertentu, bila hak tidak digunakan dalam

²⁵ Soetedjo, Asas Perjanjian, <http://notary-herman.blogspot.com/2009/04/asas-asas-hukum-perjanjian>, Selasa, 17, 09, 12, jam 18.15 wib

jangka waktu tersebut, hak itu gugur tercantum dalam Pasal 1145 KUH Perdata, jangka waktu daluwarsa adalah:

- a. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik: 30 tahun.
- b. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan: 30 tahun.²⁶

1.5.4.5 Lisensi Desain Industri

1.5.4.5.1 Pengertian Lisensi Desain Industri

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu:

1. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedraikan barang yang diberi Hak Desain Industri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak

²⁶ Sujiana, Perjanjian Daluwarsa, <http://lulusujianamai.wordpress.com>, Selasa, 17, 09, 12,jam 20.00 wib

merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.²⁷

1.5.4.5.2 Pengertian Perjanjian Lisensi

1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.²⁸
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
4. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

²⁷ Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual BAB I dan Bagian Ke 5 h. 384

²⁸ Ibid Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual h. 396

6. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi dengan Keputusan Presiden.

1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan hukum yang ada di masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan obyek penelitian.

1.6.2 Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas, penelitian ini pada umumnya mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar.

²⁹ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A, Metode Penelitian Hukum, Palu, 2009 h. 23

- c. Batang Tubuh UUD 1945.
 - d. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - e. Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - g. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - h. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - i. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - j. Peraturan-peraturan daerah.
 - k. Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi, hal ini bisa ditemukan di dalam hukum Islam dan hukum adat.
 - l. Yurisprudensi.
 - m. Traktat.
 - n. Bahan hukum yang ada sejak zaman penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ktab Undang-undang Hukum Perdata.³⁰
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengolahan Data Dan Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Wawancara

Data wawancara yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh

³⁰ ibid h. 23

peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).

1.6.4 Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek kajian.³¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Timur Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual JL. Kayun No50-52 Surabaya, Bagian Pendaftaran Desain Industri dan Pengadilan Niaga Surabaya JL. Arjuno No 16-18 Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Juni samapai dengan bulan Juli 2012. Penelitian ini dilaksanakan pada April minggu kedua. Tahap penelitian ini

³¹ Ibid h. 107

meliputi: penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan ini selama 2 (dua) bulan terhitung mulai minggu keempat bulan Juni sampai bulan Juli minggu keempat, meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum untuk member gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini.

Bab I pendahuluan dalam sub bab pertama disajikan tentang latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sub bab kedua mengenai perumusan masalah selanjutnya disajikan sub bab ketiga tujuan penulisan, sub keempat manfaat teoritis dan manfaat praktisi sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada sub kelima kajian pustaka yang merupakan landasan teori dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul diatas. Dan sub bab keenam metode penelitian yang merupakan syarat mutlak dalam setiap penelitian yang merupakan ini dibagi menjadi empat yaitu jenis penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab II pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama membahas perlindungan hukum bagi PT. X akibat penerbitan sertifikat Desain Industri oleh mantan komisaris perusahaan tersebut dengan sub bab pertama mengenai bentuk-

bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan dan sub bab yang kedua bentuk upaya dari PT. X untuk pembatalan sertifikat Desain Industri tersebut.

Bab III pembahasan tentang dampak dari penerbitan sertifikat Desain Industri yang dimiliki oleh mantan komisaris PT. X terhadap perusahaan tersebut. Dengan yang pertama dampak positif yang dialami oleh perusahaan dan sub bab yang kedua dampak negatif yang dialami oleh perusahaan.

Bab IV pembahasan tentang penutup yaitu saran dan kesimpulan dalam penulisan proposal skripsi ini.